

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
DI SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

**AYU MAIDA SARI
198520019**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
DI SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

**AYU MAIDA SARI
198520019**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

2

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
DI SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



Oleh:

**AYU MAIDA SARI
198520019**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SD Negeri
106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Nama : Ayu Maida Sari
NPM : 198520019
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Tanggal Lulus : 26 Februari 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Februari 2026


66F6DANX413139001
Ayu Maida Sari
198520019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

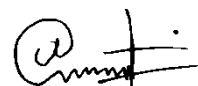
Nama : Ayu Maida Sari
NPM : 198520019
Program Studi : Studi Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas akhir Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalo-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal
Yang menyatakan



Ayu Maida Sari
198520019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan tunai pendidikan dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan, meringankan beban biaya sekolah, dan mencegah putus sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP di SDN 106162 Medan Estate sudah berjalan sesuai prosedur, namun terdapat kendala seperti keterbatasan sosialisasi kepada wali murid, kendala administrasi dalam pengumpulan bukti penggunaan dana, serta kebutuhan peningkatan koordinasi antar pihak terkait. Faktor keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, komunikasi antar organisasi, serta kesesuaian sasaran penerima bantuan. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan monitoring agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, SD Negeri 106162 Medan Estate, Pendidikan Dasar, Pemerataan Pendidikan.

ABSTRACT

This research aims to describe the Implementation of the Indonesian Smart Program policy at State Elementary School 106162 Medan Estate, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. The Indonesian Smart Program is a cash educational aid from the government aimed at increasing access to education, alleviating the burden of school fees, and preventing students from dropping out, especially those from underprivileged families. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis is conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of PIP at SDN 106162 Medan Estate has been running according to procedures; however, there are obstacles such as limited socialization to parents, administrative challenges in collecting evidence of fund usage, and the need for improved coordination among related parties. The success factors for implementation are influenced by the readiness of human resources, inter-organizational communication, and the suitability of the target recipients of assistance. The research recommends an increase in socialization and monitoring so that the program can run more effectively and accurately, thus achieving the goal of educational equity.

Implementation, Smart Indonesia Program, State Elementary School 106162 Medan Estate, Basic Education, Educational Equity.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ayu Maida Sari, lahir di Medan, Pada tanggal 07 Mei 2000 Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Alm Bapak Suwito dan ibunda Rubiah Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 106162 Medan Estate (Tahun 2006-2012), SMP Pahlawan Nasional Medan Estate (Tahun 2013-2026), dan SMK Swasta Prayatna Medan (2016-2019) Kemudian Penulis melanjutkan Studi S-1 di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil' alamin dengan segenap kerendahan hati memanjatkan puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area Bidang Ilmu Komunika. Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materi.

Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini, maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terhormat sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa buat kedua orang tua yang saya sayangi yaitu almh Ayahanda Suwito dan Ibunda Rubiah, S.Pd yang telah banyak berkorban moril maupun materi dan senantiasa dengan tulus tanpa henti mendukung serta menaruh harapan besar kepada saya untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai saya dalam setiap perjalanan hidup saya.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Rektor Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.IP. selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (ISIPOL) Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr Selamat Riadi, S.E, M.I.Kom selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (ISIPOL) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) Universitas Medan Area
5. Bapak Drs. Dr. Indra Muda, M.AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (ISOPOL) Universitas Medan Area.
6. Bapak Drs. Dr. Indra Muda, M.AP. selaku Dosen Pembimbing I penulis
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (ISOPOL) Universitas Medan Area.
8. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 106162 Medan Estate dan Seluruh Guru Pegawai, Staf, Operator Sekolah telah bersedia menerima dan membimbing dalam proses penelitian.
9. Kakak dan Adek saya yang juga banyak membantu serta memberikan motivasi yang positif bagi saya.
10. Sahabat dan teman - teman saya yang telah memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini bernama Ayu Annisa Fitri Simanjuntak, S.AP, Venica Agnes, S.AP dan Marta Yohana Siregar
11. Serta rekan-rekan stambuk 2019 di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (ISOPOL) Universitas Medan Area yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Akhir kata saya mengungkapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga berkat dan Rahmat-Nya melimpah kepada saya Khususnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini, dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 26 Maret 2026
Hormat Saya

AYU MAIDA SARI
NPM : 198520019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Masalah	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Uraian Teori	9
2.1.1 Pengertian Implementasi	9
2.2. Pengertian Kebijakan	12
2.3. Program Indonesia Pintar Sebagai Bantuan Tunai Bersyarat	14
2.3.1 Pendanaan Pendidikan	14
2.3.2 Syarat Pertama Kondisionalitas	18
2.3.3 Besaran Bantuan Tunai Program Indonesia Pintar	18
2.3.4 Tantangan Pengelolaan Program Indonesia Pintar	19
2.3.5 Biaya satuan Program Indonesia Pintar	19
2.4. Strategi Linimasa Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar.....	19
2.4.1 Rekomendasi Kartu Pintar	20
2.4.2 Pencairan Dana	21
2.4.3 Aktivitas Rekening	21
2.4.4 Linimasa Pelaksanaan Tahap Satu Indonesia Pintar	22
2.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PIP	22
2.6. Evaluasi Implementasi KIP/PIP	23

2.7. Penelitian Terdahulu	24
2.8. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	29
3.3. Informan Kunci	30
3.4. Sumber Data	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.1 Observasi	32
3.5.2 Wawancara	32
3.5.3 Dokumentasi	33
3.6. Teknik Analisis Data	34
3.6.1 Pengumpulan Data	34
3.6.2 Reduksi Data	35
3.6.3 Penyajian Data	36
3.6.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	38
3.7. Defenisi Operasional	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	40
4.1.2 Keadaan Geografis kota Deli serdang	41
4.1.3 Visi dan misi SD Negeri 106162	45
4.2. Pembahasan Penelitian.....	46
4.2.1 Implementasi Program Indonesia Pintar	46
4.2.2 Hambatan Implementasi PIP	48

4.2.3 Jumlah Siswa Penerima PIP	49
4.2.4 Jumlah Guru Mengajar	51



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2 Waktu Kegiatan Penelitian	29
Tabel 3 Luas Wilyah Deli Serdang	44
Tabel 4 Peserta Didik	51
Tabel 5 Nama - nama Guru dan tendik di SDN 106162	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A : Instrumen Pengumpulan Data	60
Lampiran B : Dokumentasi	63



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 106162	63
Gambar 2 Wawancara dengan guru SDN 106162	63
Gambar 3 Gedung Sekolah	64
Gambar 4 Wawancara dengan orangtua wali murid penerima PIP	64
Gambar 5 Papan data guru dan Lingkungan Sekolah	65
Gambar 6 Peneliti sedang bersama wali murid dan siswa	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan untuk mengatasi masalah pendidikan sekolah yang terjadi dimana masih banyak ditemukan kasus siswa dengan usia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya. PIP sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin, karena siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah pada usia dini. Hal ini disebabkan oleh keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga kebanyakan siswa memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk membantu keluarga dengan bekerja. Atas dasar masalah ini, pemerintah mengambil langkah upaya pemecahan masalah agar siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan juknis PIP tahun 2016 bahwa PIP berupa bantuan sejumlah uang tunai sebesar Rp 450.000,00 pertahun yang secara langsung diberikan kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dana PIP dimanfaatkan oleh siswa untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah seperti membeli seragam sekolah, alat tulis, tas, sepatu, dan lain- lain. Dana bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P).

Besaran cakupan penerima program PIP mencapai 20,4 juta anak-anak usia sekolah baik di sekolah atau lembaga pendidikan di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun kementerian agama. Jumlah penerima PIP pada kementerian pendidikan dan kebudayaan sebanyak 17,9 juta siswa dan Kementerian Agama sebanyak 2,4 juta siswa. Melalui program ini diharapkan dapat mengatasi rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) sekaligus sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. PIP diluncurkan oleh pemerintah di bawah tiga naungan Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang selanjutnya diteruskan kemasyarakat melalui Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi dan Kabupaten. Kemudian PIP selanjutnya dilaksanakan oleh implementor langsung yaitu sekolah untuk melaksanakan penyaluran dana. PIP merupakan program yang dilaksanakan secara nasional termasuk di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera utara.

Dana PIP diberikan kepada siswa yang tergolong dalam kategori kurang atau tidak mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD). Sekolah dasar yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang melaksanakan Program Indonesia Pintar yaitu SD Negeri 106162 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang. Pelaksanaan PIP di SD Negeri 106162 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mulai di jalankan pada tahun 2024. Jumlah siswa di tahun pelajaran 2024/2025 yaitu 408 siswa dengan penerima manfaat adalah 43 siswa, di tahun pelajaran 2024/2025 yaitu 336 siswa dengan jumlah penerimanya sebanyak 97 siswa (Badan

Pusat Statistik kabupaten Deli Serdang 2024). Berdasarkan observasi penulis di SD Negeri 106162 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP-SD) yaitu fenomena-fenomena yang terjadi terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Program Indonesia Pintar serta masih adanya siswa yang tergolong miskin tidak terdaftar sebagai penerima dana PIP.

Padahal sejatinya pemerintah meluncurkan program ini untuk membantu siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin agar mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Masalah lainnya yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa tersebut. Sehingga dana tersebut di kelola oleh orang tua siswa jadi sangat rentang akan penyalagunaan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua siswa atau membayar hutang piutang dan pihak sekolah sebagai implementor cukup sulit melakukan pengawasan akan penggunaan dana tersebut. Mengenai waktu penyaluran/pencairan dana yang disalurkan oleh pemerintah juga masih bermasalah dimana pencairan dana terkadang tidak tepat waktu.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang disempurnakan menjadi undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 telah mengubah segala peraturan menjadi desentralisasi dari yang sebelumnya bersifat sentralisasi. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur rumah

tangganya sendiri, demi membangun daerahnya dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya.

Sentralisasi dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang plural, beraneka ragam budaya, masyarakat yang majemuk dan kompleks. Desentralisasi yang diikuti dengan perluasan otonomi daerah memiliki dampak pada demokratisasi layanan publik, meningkatnya daya kritis masyarakat yang memberikan perubahan dalam sistem layanan pemerintah untuk dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien (Sandiasa & Agusatana, 2018). Oleh karena itu perlu upaya desentralisasi, tidak terkecuali desentralisasi pendidikan.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama diperjuangkan oleh tokoh pendidikan. Otonomi pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan jika mencita citakan pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas. Bentuk kemandirian dalam pendidikan berbeda dengan kemandirian bidang lainnya. Otonomi di bidang pendidikan tidak berhenti pada daerah di tingkat Kabupaten dan Kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai persoalan, diantaranya adalah rendahnya sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Berbagai macam usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya peningkatan kompetensi guru

melalui berbagai pelatihan, pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan mutu manajemen sekolah, dan pengadaan buku dan alat pelajaran.

Berbagai penilaian mutu pendidikan dan angka partisipasi pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Alasan utama rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok ekonomi bawah adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya pembelian seragam, buku, dan alat tulis. Sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lainnya. Selain itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan oleh pemerintah memiliki dampak bagi masyarakat keluarga miskin dalam partisipasi pendidikan. Berikut beberapa alasan rendahnya partisipasi pendidikan, diantaranya: (1) sulitnya menjangkau layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah, (2) rehabilitasi dan revitalisasi pembangunan telah menyediakan sekolah dengan kondisi baik tetapi siswa sulit mengakses layanan tersebut karena tidak memiliki biaya dan (3) tingginya keluarga miskin putus sekolah karena segala sumber daya yang ada digunakan untuk mencari nafkah dan dana keluarga yang ada diprioritaskan untuk bertahan hidup bukan untuk mengakses biaya pendidikan. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara. Hal ini diperjelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh biaya pendidikan bagi orang tua peserta didik yang tidak mampu.

Hal ini merupakan salah satu unsur yang diperhatikan negara karena pendidikan memiliki peran yang begitu vital dalam membentuk sumber daya manusia yang akan memajukan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah meluncurkan program-program bantuan dalam pendidikan yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan putus sekolah. Melalui program tersebut akan memberikan ruang pada negara untuk membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda dengan pendidikan yang layak (Rohaeni & Saryono, 2018).

Beberapa program bantuan pendidikan diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat membantu siswa dalam bidang pendidikan. PIP adalah pemberian bantuan pendidikan secara tunai kepada anak sekolah usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu dan merupakan bagian dari penyempurnaan Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP diimplementasikan dalam rangka melaksanakan Kebijakan Presiden Nomor 7 tahun 2014 guna membentuk dan membangun keluarga produktif.

PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Lembaga pendidikan nonformal lainnya atau sesuai dengan kreteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil dari pemaparan permasalahan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian dengan judul sebagai berikut:

“Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2024?
2. Apa saja Hambatan untuk mengimplementasikan Program Indonesia Pintar di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi rekomendasi guna meningkatkan pelaksanaan dan keberhasilan program Indonesia pintar di masa depan.

1. Untuk mengetahui cara implementasi program indonesia pintar di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada pengimplementasi program indonesia pintar di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diatarnya adalah meliputi :

1. Untuk meberitahukan dan mengetahui sejauh mana implementasi PIP berhasil meningkatkan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
2. Dapat meberitahukan dan mengetahui sejauh mana implemetasi PIP dapat Mengukur dampak program terhadap angka putus sekolah dan partisipasi pendidikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi menurut para ahli Grindle(1980:7) dalam proses implementasi pada program kartu pip untuk melaksanakan keputusan oleh pihak kementerian pendidikan dan berbagai actor sumber daya dan strukur kelembangan untuk mencapai tujuan kebijakan .

Mazmanian & Sabatier (1983: 20) implementasi adalah melaksanakan keputusan oleh pemerintahan biasanya dalam bentuk perintah dan kebijakan dasar pula bentuk perintah eksetutif dan keputusan pengadilan dan mengindefikan masalah yang dihadapi menetapkan tujuan yang dinginkan dicapai dan berbagi cara untuk menstrukturkan proses implementasikan.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, (2008;195) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan tindakan dalam keputusan keputusan sebelumnya. Tindakan tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan tujuan yang telah diterapkan”.

Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

seperangkat peraturan yang dibuat oleh yang berwenang agar tujuan dalam sistem pendidikan dapat tercapai dengan baik. Meter dan Horn dalam Rusdiana menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan secara menyeluruh yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diorientasikan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan berupa upaya tindakan-tindakan yang mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Prasetyono, 2018:30).

Implementasi kebijakan mendorong pada suatu aktivitas atau kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut. Akhir dari implementasi akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah lanjutan setelah proses perumusan dan penetapan kebijakan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai

tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari pemerintah, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Parmadi, 2018). Lebih lanjut Islamy menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila tindakan masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau kebijakan dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Parmadi, 2018:40).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 pasal 1 ayat 1, Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan uang tunai dari pemerintah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya. PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dengan adanya PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik untuk melanjutkan pendidikan sampai tamat sekolah menengah atas dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Pemberian manfaat kartu Indonesia pintar tidak hanya bagi peserta didik di lingkungan pendidikan formal, tetapi diberikan juga bagi peserta didik di satuan pendidikan nonformal. Program ini diharapkan dapat menjadi gerbang menuju pendidikan yang setara (Setyawan: 2018:56). Penerima manfaat PIP adalah anak usia enam sampai dua puluh satu tahun yang memenuhi kriteria: (1) berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau kartu penanda lain seperti tanda peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM)

daripihak desa/kelurahan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pimpinan lembaga/ satuan pendidikan;

(2) berdasarkan afirmasi, terdiri atas anak-anak: penyintas bencana alam/konflik sosial; mengalami hambatan ekonomi sehingga terancam putus sekolah; yatim dan/atau piatu; anak penyandang disabilitas, keluarga dengan orang tua/wali terpidana, tinggal di panti asuhan/rumah singgah, dan/atau

Mempunyai lebih daripada tiga saudara berusia kurang dari 18 tahun. Empat kelompok afirmatif ini dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak desa/kelurahan atau pimpinan lembaga/satuan pendidikan (TNP2K: 2019). Bantuan PIP disalurkan dua kali dalam satu tahun melalui KIP. Pengambilan manfaat KIP dilakukan secara langsung ke lembaga/ bank penyalur yang telah ditunjuk, setelah siswa/orangtua menerima pemberitahuan dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal tempat anak terdaftar. Pengambilan dilakukan dengan membawa dan menunjukkan beberapa dokumen pendukung berupa surat pemberitahuan penerima bantuan PIP dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal dan bukti identitas lainnya seperti rapor, kartu keluarga, ijazah, akte kelahiran dan sebagainya. Bantuan dana pendidikan secara tunai melalui PIP dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa seperti pembelian seragam dan perlengkapan sekolah, buku dan alat tulis, transportasi kesekolah, uang saku, kursus tambahan dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan manfaat pendidikan di sekolah (Hasan, 2017:67).

2.2 Pengertian Kebijakan

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada

umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Carl Friedrich Wahab(2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Situmorang (2016:24). Evaluasi atau penilaian kebijakan melibatkan pembahasan ulang mengenai implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil dan akibat dari implementasi kebijakan (Meutia, 2013). Evaluasi kebijakan untuk mengetahui penyebab kegagalan dan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan Maulana & Nugroho, (2019:57). Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya kebijakan publik yang telah dibuat dan diimplementasikan.

Sehubungan dengan itu Maulana & Nugroho,(2019:87). Evaluasi dampak hanya dapat dilakukan secara memuaskan apabila program telah terlaksana secara lengkap dan telah berjalan dalam jangka waktu yang relatif lama (Rusdiana, 2015). Langkah-langkah evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan program, menganalisis masalah, mendeskripsikan kegiatan, mengukur perubahan hasil, menentukan penyebab perubahan hasil dan menentukan indikator adanya dampak Situmorang,(2016:45).

Rian Nugroho (2003:67) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Meter dan Horn dalam Subarsono (2005 : 99) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil Kebijakan.

Data dan informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi kebijakan dapat berupa dokumentasi, survei, wawancara, observasi dan Focus Group Discussion. Adapun kebijakan public sebagaimana yang dirumuskan oleh Meuti (2013:87). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar menggunakan metode single program before after yaitu kegiatan evaluasi dengan melihat perubahan sebelum dan sesudah pada kelompok sasaran.

Evaluasi kebijakan memerlukan data untuk melakukan evaluasi dalam waktu yang relatif lama, oleh karena itu Program Indonesia Pintar menggunakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendidikan yang dituntaskan menurut jenjang, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni. Data yang diperbandingkan untuk menilai capaian pendidikan adalah sebelum penerapan kebijakan PIP tahun 2009-2014 dan sesudah kebijakan PIP tahun 2015-2020.

Kebijakan hasil beasiswa dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan beasiswa dengan hasil beasiswa yang telah dilaksanakan Mawer (2017:90). Negara

yang ingin meningkatkan capaian pendidikan dan pendapatannya sebaiknya menggalakkan kebijakan yang dapat menekan biaya pendidikan dan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin Villareal, (2018:99). Mengevaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan membandingkan capaian pendidikan sebelum dan sesudah kebijakan ini dilaksanakan. Capaian pendidikan yang diukur adalah Partisipasi Pendidikan dan jenjang pendidikan yang dituntaskan karena program ini bertujuan agar siswa dapat mengikuti pendidikan hingga lulus sekolah.

2.3 PIP Sebagai Bantuan Tunai Bersyarat

2.3.1 Pendanaan Pendidikan

Teori mengenai biaya pendidikan cukup beragam. Supriadi (2004:123), mendefinisikan biaya pendidikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Menyangkut jenisnya, Fattah (2000:167) membagi biaya pendidikan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan keluarga siswa yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang secara langsung terkait dengan pendidikan seperti alat tulis dan seragam. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak terkait secara langsung dengan sekolah namun mendukung aktivitas sekolah, seperti biaya kesehatan dan foregone earning. Adapun sumber biaya, menurut Bray (1996:12) menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah keseluruhan masukan yang dapat diperoleh dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan agen-agen lain yang relevan.

Untuk konteks Indonesia, konsep biaya pendidikan sendiri telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan tersebut dijelaskan secara garis besar terdapat tiga jenis biaya pendidikan, yaitu: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Terkait biaya satuan Pendidikan, mencakup empat ragam yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya penyelenggaraan juga terdiri atas biaya investasi dan biaya operasi. Biaya operasi dalam kedua jenis biaya di atas terdiri dari biaya operasi personalia dan non-personalia. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok dari biaya pendidikan mencakup: biaya investasi, operasi, dan pribadi. Mengenai sumber pendanaan pendidikan, pasal 51 dari peraturan tersebut juga menyebutkan adanya tiga unsur, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Perencanaan pembiayaan pendidikan yang tepat perlu dihitung suatu biaya satuan (unit cost), yaitu biaya yang dibutuhkan setiap satu orang agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan secara ideal. Biaya satuan dapat diterapkan untuk ketiga jenis biaya pendidikan tersebut.

Fattah (2012) mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) cara untuk menghitung unit cost pada tingkat satuan pendidikan :

- a. Biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah/suatu level;
- b. Biaya rata-rata per lulusan, yaitu biaya total keseluruhan dibagi jumlah lulusan

Dalam bentuk persamaan, penghitungan biaya satuan pendidikan di tingkat sekolah dapat ditulis sebagai berikut :

$$S_b(s,t) = f(K(s,t) \text{ dan } M(s,t))$$

Di mana:

S_b = biaya satuan per siswa per tahun
 K = jumlah seluruh pengeluaran
 M = jumlah siswa
 s = sekolah tertentu
 s = sekolah tertentu
 t = tahun tertentu

Pendanaan Pendidikan di Indonesia mengamanatkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kewajiban itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008. Pada 2019, Pemerintah mengalokasikan Rp 492,5 triliun untuk pendidikan dari porsi belanja negara dalam APBN sebesar Rp 2.461 triliun. Melalui dana tersebut, pemerintah membiayai operasional sekolah seluruh Indonesia untuk seluruh jenjang, baik negeri maupun swasta. Namun, hingga 2019, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan besaran sesuai standar biaya hanya diberikan kepada jenjang SD dan SMP.

Sedangkan untuk SMA dan SMK, dana BOS dialokasikan kurang dari standar. Oleh karena itu, pada jenjang tersebut, orang tua peserta didik masih dimungkinkan memungut biaya. Selain BOS, dana pendidikan juga dialokasikan untuk pembiayaan Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan atau renovasi ruang kelas, tunjangan profesi guru, pengadaan buku, dan aneka fungsi pendidikan lainnya. Jika mengacu pada komponen pembiayaan BOS, pemerintah pada dasarnya telah menanggung seluruh kebutuhan biaya operasional pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Bantuan tersebut mencakup seluruh kegiatan

pendidikan mulai penerimaan peserta didik. baru, pengadaan buku teks pelajaran, penyelenggaraan ujian, dan biaya utilitas rutin. PIP melengkapi pembiayaan personal peserta didik seperti transportasi, konsumsi, dan uang saku. Namun, pemerintah pusat bukan satu-satunya sumber pendanaan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 (1) menyatakan “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) penyelenggara atau satuan pendidikan (SP) yang didirikan masyarakat;
- b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Hasil kajian Bank Dunia (2009) mengindikasikan bahwa investasi pemerintah daerah dalam sektor pendidikan belum berbasis pada kebutuhan dan permasalahan masing-masing daerah. Anggaran pendidikan di daerah sebagian besar berfokus pada pembiayaan kegiatan kegiatan rutin.

2.3.2 Syarat Pertama Kondisionalitas

Syarat pertama kondisionalitas dalam implementasi program bantuan perlindungan social(seperti kartu indonesia pintar atau kartu indonesia sehat/kartu keluarga sejahtera. Penerima manfaat harus termasuk dalam kategori rumah tangga miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam basis data terpadu(seperti data terpadu kesejahteraan social, ini berarti bahwa :

- Rumah tangga harus teridentifikasi dan tervalidasi sebagai miskin
- Data mereka harus tercatat dalam system resmi yang digunakan pemerintahan untuk menyalurkan bantuan

2.3.3 Besaran Bantuan Tunai PIP

Besaran bantuan tunai program Indonesia pintar(PIP)pada tahun 2024 bervariasi sesuai jenjang pendidikan dan stastus siswa (aktif) berikut rincian lengkapnya.

- a. Jenjang sekolah dasar (SD/SDLB/paket A)
 - Siswa kelas I-V:RP 450.000 pertahun
 - Siswa kelas VI:RP 225.0000 pertahun
- b. Jenjang sekolah menengah pertama (SMP/SMPLB/Paket B)
 - Siswa kelas VII-VIII:RP750.000/pertahun
 - Siswa kelas XI:RP 375.000/pertahun
- c. Jenjang sekolah menengah keatas kejuruan(SMA/SMK/SMALB/Paket C)
 - Siswa kelas X-XI:RP 1.800.000/pertahun
 - Siswa kelas XII:RP900.000/pertahun

2.3.4 Tantangan Pengelola Program Indonesia Pintar

1. Validitas dan akuransi data penerima
 - Banyak data penerima yang tidak mutakhir menyebabkan siswa yang sudah tidak sekolah atau pindah sekolah masih tercatat sebagai penerima
2. Distribusi dan penyaluran dana

- Keterlambatan pencairan dana menjadi masalah umum, terutama di daerah terkecil

3. Pemanfaatan dana

- Dana yang diberikan terkandang tidak menggunakan untuk keperluan pendidikan karena minim control dan pembinaan pada keluarga

2.3.5 Biaya Satuan PIP

Biaya bantuan tunai program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2024

a. Jenjang sekolah dasar (SD/SDLB/paket A)

- Siswa kelas I-V:RP 450.000 pertahun
- Siswa kelas VI:RP 225.0000 pertahun

b. Jenjang sekolah menengah pertama (SMP/SMPLB/Paket B)

- Siswa kelas VII-VIII:RP750.000/pertahun
- Siswa kelas XI:RP 375.000/pertahun

c. Jenjang sekolah menengah keatas kejuruan(SMA/SMK/SMALB/Paket C)

- Siswa kelas X-XI:RP 1.800.000/pertahun
- Siswa kelas XII:RP900.000/pertahun

2.4 Strategi Linimasa Pengelola Kartu Indonesia Pintar

Strategi linimasa (timeline strategis) pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP)

1. Perencanaan Awal (Januari-Februari)

- Pembaruan data DTKS dan Dapodik:memastikan data siswa miskin dan rentan diinput dan diperbarui oleh sekolah

- Koordinasi lintas instansi: kementerian pendidikan, dinas pendidikan dan lembaga keuangan diselaraskan untuk kesiapan program
2. Penetapan Penerima Manfaat (Maret-April)
- Verifikasi dan validasi calon penerima oleh sekolah dan dinas
 - Pengumuman daftar penerima pip melalui portal resmi (pip.kemdikbud.go.id.)
 - Pembukaan atau pemutakhiran rekening simpanan pelajar (simpler)
3. Penyaluran Tahap 1 (Mei-Juni)
- Transfer dana PIP tahap 1 rekening siswa
 - Sosialisasi kepada siswa dan orang tua mengenai penggunaan dana
4. Monitoring & Evaluasi pertengahan tahun (Juli-Agustus)
- Evaluasi penyaluran tahap 1: pencairan penggunaan dan dampak awal
5. Penyaluran Tahap 2 (September-Oktober)
- Transfer dana PIP tahap 2 untuk semester selanjutnya
6. Evaluasi akhir tahun (november-desember)
- Laporan penggunaan dana oleh sekolah dan siswa
 - Rekomendasi perbaikan program untuk tahun berikut

2.4.1 Rekomendasi Kartu Indonesia pintar

1. Digitalisasi dan integrasi data

- Integrasikan data PIP dengan NIK, NISN dan DTKS dalam satu sistem terpadu

2. Transparansi penyaluran dana

- Notifikasi langsung ke orang tua /siswa saat dana cair melalui SMS dan aplikasi

3. Pendampingan dan edukasi pemanfaatan dana

- Libatkan guru dan wali kelas dalam monitoring penggunaan bantuan untuk keperluan pendidikan.

4. Peningkatan akses untuk daerah 3T

- System offline/semi otomatis untuk sekolah tanpa akses internet

2.4.2 Pencarian Dana

Pencarian dana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dilakukan oleh siswa dan orang tua melalui langkah-langkah resmi dari pemerintah

1. Cek status penerima pip

Kunjungi situs resmi: <https://pip.kemdikbud.go.id> masukkan data berikut

- NISN (nomor induk siswa nasional)
- Tanggal Lahir
- Nama Ibu Kandung

2.4.3. Aktivitas Rekening

1. Jika siswa baru pertama kali menerima bantuan dana

- Sekolah akan memberikan surat pemberitahuan dari bank penyalur (BNI, BRI, BSI)
- Siswa/orang tua membawa surat tersebut ke cabang bank terdekat
- Kartu pelajar/surat keterangan sekolah
- Kartu keluarga (KK)

- KTP orang tua/wali
- Surat kuasa jika diwakilin

2. Pencarian dana

- Dana akan langsung di transfer kerekening siswa

3. Konfirmasi dan laporan

- Seragam
- Alat tulis
- Transportasi kesekolah

2.4.4 Liminasi Pelaksanakan Tahap Satu Indonesia Pintar

1. Data Tidak Valid atau Tidak Sinkron
2. Rekening Bank Tidak Aktif atau Bermasalah
3. Prioritas Penerima pada Tahap Awal
4. Perubahan Status Sosial Ekonomi

2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PIP

Dampak Implementasi PIP Dampak Positif meningkatkan partisipasi sekolah siswa dari keluarga miskin lebih termotivasi melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan terbantu.membantu kebutuhan dasar pendidikan dana digunakan untuk membeli seragam, alat tulis, dan transportasi. Menumbuhkan Kesadaran Orang Tua PIP meningkatkan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak.

Dampak Negatif (Jika Tidak Dikelola Baik) ketergantungan bantuan beberapa keluarga terlalu mengandalkan bantuan tanpa upaya pemberdayaan ekonomi. dana tidak tepat guna tanpa pengawasan, dana PIP berpotensi digunakan untuk kebutuhan konsumtif non-pendidikan.

2.6 Evaluasi Implementasi KIP/PIP

1. Kinerja Positif

Peningkatan Akses Pendidikan: Program ini berhasil membantu siswa miskin tetap bersekolah, terutama di tingkat SD dan SMP. Penurunan Angka Putus Sekolah: Data dari Kemdikbud menunjukkan penurunan dropout di beberapa wilayah berkat intervensi bantuan tunai KIP.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan

Distribusi yang Tidak Merata: Masih terdapat ketimpangan antara daerah perkotaan dan terpencil, terutama dalam pencairan dana. Ketidaksesuaian Data: Banyak kasus siswa tidak menerima dana meskipun layak, akibat kesalahan atau keterlambatan update di Dapodik dan DTKS. Pengawasan Lemah: Penggunaan dana kurang diawasi secara langsung, sehingga rawan digunakan di luar kebutuhan pendidikan.

3. Kendala Teknis

Keterbatasan Infrastruktur: Di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), akses terhadap bank penyalur dan internet sangat terbatas. Rekening Tidak Aktif: Banyak siswa memiliki rekening yang tidak aktif karena belum diaktivasi secara langsung di bank.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di SD Negeri 106162 medan estate kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Beberapa penelitian yang berkaitan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Putri Mutiara	Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)	Kualitatif	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan implementasi program Indonesia pintar pada tingkat dasar di kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan SOP yang berlaku.
2	Yudi Agusman	Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka	Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan dari variable ukuran dan tujuan kebijakn/belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada siswa miskin menerima PIP. Sumber daya manusia sudah sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, sumber dana mengalami keterlambatan pencairan dan PIP, dan ada masalah pendistribusian dan PIP serta belum optimalnya pengawasan dan bagi penerima manfaat. Karakteristik pelaksanaan dalam menjalankan tugasnya

				sudah berusaha melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Dipsosi Implementasi para pelaksana penerima PIP sangat antusias dan berbaur baik dengan orang tua siswa.
3	Endang Suparman	Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan program Indonesia pintar di wilayah kerja dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten tasikmalaya, komunikasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga para pelaksana proses kegiatan implemntasi kebijakn mampu melaksanakan tahapan mekanisme program Indonesia pintar sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) hingga dana bantuan dari program Indonesia ini bisa samoai ke tangan pemanfaat dalam hal ini para peserta didik, penerima bantuan dana program Indonesia pintar ini adalah peserta didik denagan kriteria-kriteria tertentu yang sudah diatur ketentuannya dalam juknis.
4	Nurhasana Hayati dan Eka Yukiani Sari	Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar Di SMP Negeri 1 Sembawa	Kualitatif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi program Indonesia pintar (PIP) di SMA 1 Sembawa belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya hai ini dapat dilihat dari 1).

				masih banyaknya siswa yang menerima dana PIP adalah siswa yang tidak tepat sasaran, hal ini diantaranya karena data yang digunakan dalam penentuan calon penerima KIP atau PIP masih kurang akurat 2). Masih rendahnya kesadaran siswa dan orang tua siswa tentang peruntukan bantuan dana PIP, 3) Waktu pencairan dana PIP yang terlambat karena kurangnya sosialisasi serta 4) Mekanisme pencairan dana PIP yang sulit
5	Romanti Agusman, Adia Ferizko	Implementasi Program Indonesia Pintar (Studi kasus Di Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru	Kulitatif	Hasil penelitian Implementasi Program Indonesia Pintar (Studi Kasus di sekolah Dasar negeri 117 Pekanbaru) Sudah dilaksanakan oleh stakeholder terkait yakni dinas Pendidikan dan sekolah dasar itu sendiri dengan melakukan koordinasi rapat kerja serta sosialisasi terkait dengan keberadaan program agar dapat diberikan kepada siswa sekolah dasar dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku namun masih ada kekurangan pada aspek sumber daya yakni anggaran yang belum memadai sehingga target penerimaan Bantuan program Indonesia pintar sekolah dasar (SD) setiap tahunnya menalami kenaikan dan penurunan jumlah sehingga memungkinkan Masyarakat

				untuk tidak mendapatkan bantuan lagi.
--	--	--	--	---------------------------------------

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah stuktur atau kerangka yang digunakan untuk memikirkan dan menganalisis suatu permasalahan atau topik. Kerangka berpikir membantu untuk mengorganisir pikiran, mengidentifikasi hubungan antara konsep, dan memecahkan masalah secara sistematis. Defenisi lain kerangka adalah suatu rangkaian logis yang menggambarkan hubungan antar konsep, variabel, atau teori yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena atau masalah dikaji dan dianalisis. Dalam konteks penelitian implementasi kebijakan pendidikan, kerangka berpikir berfungsi sebagai panduan

untuk memahami proses, faktor pendukung dan penghambat, serta akibat dari implementasi kebijakan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dengan demikian bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh informasi terkait dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data tentang proses implementasi pelaksanaan program bantuan perumahan swadaya di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mencari informasi terkait proses pengimplementasian kebijakan kartu Indonesia pintar yang mana apakah para implementor telah mengetahui bagaimana standard dan sasaran kebijakan yang seharusnya, agar dapat mencapai hasil kebijakan itu sendiri. Selain itu penulis juga akan mengobservasi terkait komunikasi dan sikap antar implementor yang mana untuk mencapai sasaran kebijakan, sikap dan koordinasi atau kerjasama antar

implementor sangat dibutuhkan agar implemento rapat mengoptimalkan sumber daya, potensi untuk mencapai kesejahteraan sekolah dasar 106162

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD negeri 106162 medan estate kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang provinsi Sumatra utara merupakan salah satu desa yang menerima Program kebijakan kartu Indonesia pintar dari pemerintah melalui Kementerian pendidikan dan kementerian keuangan Merupakan sekolah yang meningkatkan partipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan program kebijakan kartu Indonesia pintar Menjadi salah satu desa yang menunjukkan dinamika implementasi kebijakan secara langsung melalui keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah

2. Waktu Penelitian

Tabel 2. Waktu Kegiatan Penelitian

No	Uraian kegiatan	Jan 2025	Feb - Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agst 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025
1	Pengajuan judul								
2	Penyusunan proposal								
3	Seminar proposal								
4	Pengambilan data penelitian								
5	Seminar hasil								
6	Revisi skripsi								
7	Sidang meja hijau								

3.3 Informan Kunci

Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru yang menangani administrasi PIP, serta siswa penerima manfaat PIP di SD Negeri 106162 Medan Estate. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah tersebut, meliputi proses penyaluran bantuan, penggunaan dana, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan pendidikan siswa. dan Informan adalah anggota kelompok partisipan yang bertindak sebagai pengaruh dan penafsir muatan budaya atau aktor yang terlibat langsung dengan masalah penelitian informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (sugiyono,2017:221) yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Informan kunci merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak terbatas pada wilayah tempat tinggal tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019:25) informan kuncinya yaitu ibu Kepala Sekolah dan Opereator sekolah selaku informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail.
2. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail masalah penelitian yang akan diteliti (Sugiyono, 2019:25) informan utama yaitu: Opereator sekolah orangtua wali murid.
3. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru, dan siswa penerima PIP. Selain itu, dilakukan pengecekan kembali data melalui dokumentasi resmi sekolah dan peraturan pemerintah terkait PIP.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah subjek dari mana data itu ditemukan (Suharsimi arikunto, 2010:172) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan literatur lainnya (Lexy J.moleong, 2005:157). Peneliti menggunakan dua sumber data dalam memperoleh dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini antara lain:

A. Sumber Data Sekunder

Menurut bungin data sekunder adalah sata yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut amirin data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Sumber yang bukan asli yang dimaksud amirin disini sebenarnya adalah sumber kedua sebagaimana yang disebut oleh bungin.

B. Sumber Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang menurut informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud Amirin disini adalah sumber pertama sebagaimana yang disebut oleh bungin.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Nasution (1998:120) Menyatakan bahwa, obesrvasi adalah semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda yang sangat kecil (Proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas . Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

3.5.2 Wawancara

Esterberg (2002:234) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur :

1. Wawancara terstruktur (Structured Interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informan apa yang diperoleh oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview)

Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori *in-dept interview*, di mana terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat,

dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview)

Wawancara tidak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan pedoman wawancara dan lembar observasi yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian tentang kebijakan PIP.

3.5.3. Dokumentasi

Menurut Riyanto (2012: 103) Metode Dokumentasi ialah pengumpulan data dengan cara merekam data yang ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. (Sugiyono 2015: 150) dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ini dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dengan cara mengambil foto atau gambar untuk membedakan rumah yang sebelum dibedah dan sesudah supaya dapat memastikan bahwa rumah tersebut nyata dilakukan bedah rumah tersebut.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1998:128) menyatakan bahwa “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data *In fact, data analysis in qualitative qualitative research is an ongoing activity that occurs through the investigative process rather than after pricess*. Dalam kenyataanya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah: Reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data, menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Penarikan kesimpulan/verifikasi, menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan dan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan keabsahan data.

3.6.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi dan kemudian menuliskannya dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, gambar, dan sebagainya (Miles dan Huberman, 1992: 15-21). Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pengumpulan data adalah mencari untuk mencatat dan mengumpulkan segala sesuatunya secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan yaitu pencatatan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada dilapangan (Sugiyono, 2010: 338) sama seperti Teknik pengumpulan data yang telah dituliskan diatas, maka yang akan dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

3.6.2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merengsum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan diacapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang dipandang asing tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

3.6.3 Penyajian Data

Dalam Penelitian Kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan *the most frequent form of displaying data for qualitative research data in the past has been narrative text* yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dialami tersebut. *“looking at displays help us understand what is happening and to some thing-further analysis or caution on that understanding”*. Miles and Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang sudah didisplaykan, maka perlu dijawab pertanyaan berikut. Apakah anda tahu, apa isi yang didisplaykan? Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan hasil pengumpulan data secara sistematis dan mudah dipahami sehingga dapat menggambarkan proses serta hasil implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 106162 Medan Estate. Proses penyajian data dilakukan sebagai berikut:

1. Penyajian Data Kualitatif

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Narasi ini menggambarkan proses pelaksanaan PIP, peran guru, dukungan sekolah, serta kendala-kendala yang

dihadapi selama implementasi program. Teknik kutipan langsung dari hasil wawancara juga digunakan untuk memperkuat gambaran yang disajikan.

2. Pengelompokan Data

Data disusun berdasarkan tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, seperti kemampuan pelaksana, mekanisme distribusi dana, dukungan lingkungan sekolah, dan evaluasi pemanfaatan program.



3. Analisis Sementara

Penyajian data juga disertai dengan analisis interpretatif secara singkat yang menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori dan tujuan penelitian, sebagai langkah awal dalam penarikan kesimpulan.

Dengan metode penyajian yang sistematis ini, diharapkan pembaca dapat memahami secara komprehensif bagaimana Program Indonesia Pintar diimplementasikan di SD Negeri 106162 Medan Estate serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Rumus Statistik

1. Statistik Deskriptif

Untuk mendeskripsikan data hasil penelitian, digunakan statistik deskriptif berupa:

- **Mean (Rata-rata)**

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Dimana:

$\bar{X}$ = nilai rata-rata

X_i = nilai data ke-i

n = jumlah data

- **Standar Deviasi (SD)**

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Digunakan untuk mengetahui sebaran data dari rata-rata.

- **Frekuensi dan Persentase**

Digunakan untuk mengelompokkan data kategori, misalnya jumlah siswa penerima PIP, kendala yang dialami, dan sebagainya.

2. Kategorisasi Tingkat Implementasi

Untuk mengkategorikan tingkat implementasi kebijakan berdasarkan skor rata-rata dan standar deviasi, dapat digunakan rumus:

Kategori	Rentang Nilai
Rendah	$X < \bar{X} - 1SD$
Sedang	$\bar{X} - 1SD \leq X \leq \bar{X} + 1SD$
Tinggi	$X > \bar{X} + 1SD$

3.6.4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Jika tidak ditemukan bukti-bukti yang nyata dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka simpulan yang sudah dikemukakan bersifat sementara dan tentunya berubah. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan ada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang valid. Kesimpulan yang dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang valid. Kesimpulan yang dibuat harus berkaitan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang telah diperjelas dan dibahas. Penarikan simpulan pada dapat diperoleh dari bukti-bukti nyata yang berkaitan dengan program Bantuan kartu Indonesia pintar bukti-bukti ini juga nanti akan dikembangkan menjadi kesimpulan yang memuat faktor penghambat program Bantuan Bantuan kartu Indonesia pintar serta upaya Pemerintah dalam mengatasi

kegagalan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam proses program Bantuan kartu Indonesia pintar.

3.7. Definisi Operasional

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan pemerintah berupa uang tunai dan akses pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai kebutuhan pendidikan mereka, seperti pembelian buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu identitas yang diberikan kepada penerima PIP sebagai bukti dan alat pencairan dana bantuan pendidikan. Implementasi kebijakan dalam konteks ini adalah proses pelaksanaan program PIP di tingkat sekolah, termasuk penyaluran dana, pemanfaatan bantuan, serta pengawasan dan evaluasi oleh pihak sekolah. Penjelasan tersebut disusun berdasarkan pemahaman umum dan informasi resmi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) yang mencakup tujuan, sasaran, mekanisme penyaluran, serta manfaat program tersebut bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Jika diperlukan, bagian ini dapat dilengkapi dengan data lapangan yang diperoleh dari SD Negeri 106162 Medan Estate.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

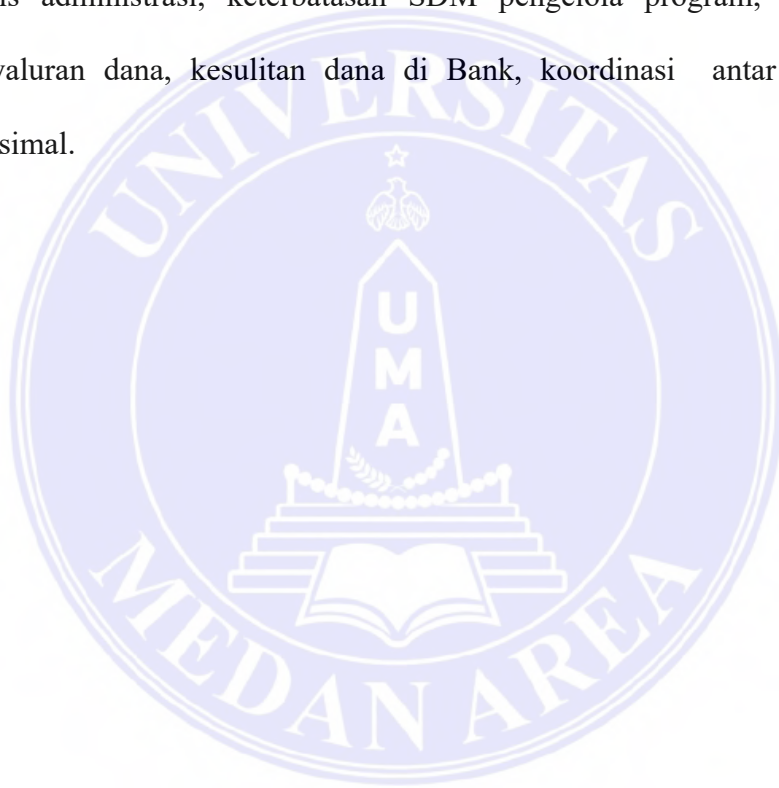
1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 106162 Medan Estate secara umum berjalan dengan baik sesuai dengan indikator implementasi kebijakan, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, hubungan antar organisasi, sikap pelaksana, serta lingkungan kebijakan.
2. Hambatan Program Indonesia Pintar (PIP) SD Negeri 106162 Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Data dan Administrasi yang tidak akurat, kurangnya sosialisasi dan pemahaman orang tua/Warga, hambatan teknis/infaktruktur. keterbatasan SDM sekolah, Stigma sosial atau rasa Malu dari keluarga, keterlambatan penyaluran atau masalah logistic, penyalahgunakan/ ketidaktelitian dalam penyaluran, hambatan komunikasi antar-lembaga, kendala transportasi/akses geografis siswa, Aspek regulasi/perubahan kebijakan.

5.2 saran

1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) peningkatan validasi data siswa, sekolah perlu melakukan pemutakhiran data siswa secara berkala khususnya

terkait dengan kondisi ekonomi, keluarga agar penerima PIP tepat sasaran, sosialisai program yang lebih intensif, peningkatan kapasitas SDM sekolah, penguatan koordinasi antar-lembaga, pendampingan pencairan Dana, pengawasan dan evaluasi berkala, pendekatan personal dan Humanis.

2. Hambatan Program Indonesia Pintar (PIP) SD Negeri 106162 Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ketidak akurat, kurangnya sosialisasi program, kendala teknis administrasi, keterbatasan SDM pengelola program, keterlambatan penyaluran dana, kesulitan dana di Bank, koordinasi antar pihak belum maksimal.



DAFTAR PUSAKA

A. BUKU

- Ahamad.”Kinerja Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar : Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 19 (1); 532-534
- Badan Pemeriksaan Keuangan. 2018. “Laporan Audit Pemeriksaan Pendahuluan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun.” Jakarta : BPK RI. Tidak diterbitkan
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37 Tahun 2010 tentang klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Indonesia*. Jakarta
- Badan Pusat Statisti. 2018. “Pengolaan Data Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2018” Tidak diterbitkan Bray. Mark. 1996. *Counting the Full Cost : Parental and Community Financial of Education in East Asia*.
- Washinton DC :The World Bank Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Ghozali, Abbas. Dkk. 2005. “Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah : Laporan Penelitian” Jakarta : Badan Penelitian dan pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
- Herlinawati. Bambang Indriyanto. Catur Dyah Fajarini, & Sudiyant. 2017.*Kajian Implementasi program Indonesia Pintar, Jakarta : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan kebudayaan*
- Herlinawati, Philip Suprastowo, & *Evaluasi Pemberian Bantuan program Indonesia Pintar Tahun 2017. Dengan Fasilitas KIP ATM Pada kunjungan kerja Presiden RI. Jakarta : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan kebudayaan*
- Hermawan, Ida Kintanami Dewi. 2017. *Metode Menyusun Proyeksi siswa dalam perencanaan pendidikan, Yogyakarta : Deepublish*
- Kemendikbud. 2018a. “Penyaluran Dana PIP. Kemdikbud. go.id/Pendidikan/data 2018 (diakses 17 Januari 2019)
- Kemendikbud. 2019. “Rekapitulasi Data pokok Pendidikan Nasional” dalam <http://dapo.diddasmes.kemdikbud.go.id> / (diakses 28 Meret 2019)
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta : Departemen Keuangan*

Pemerintah Republik Indonesia, 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Kementerian ketenagakerjaan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Internasional Labour Organization (ILO) Convention 102.

Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Usia dini Pendidikan Masyarakat No.07/D/BP/2017 & No. 02/MPK.C/PM/ 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017.

C. Internet

Anggaran Program Indonesia Pintar 2017 Menurun, (2016: Oktober 25).

<http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/10/2025/anggaran-Program.Indonesia-Pintar-2017-menurun-383155>, diakses 9 November 2017)

Di Kota kupang Total Penerima Beasiswa PIP 33955 Siswa.
<http://kupang.tribunnews.com/2016/05/26/dikota-kupang-total-penerima-beasiswa-pip-33955-siswa>, diakses 27 Februari 2017.

Lampung Penerima Kartu Indonesia Pintar Terbanyak,
<http://duajurnal.co/2016/10/01/lampung-penerima-kartu-indonesia-pintar-terbanyak/>. Diakses 17 Februari 2017.

Model dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan,
<https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>,diakses 12 Mei 2017.

Model Implementasi Kebijakan George Edward III.
http://mulyono.staff.Uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan_george-edward-iii/. Diakses 12 Mei 2017.

Pendidikan Sebagai Kebutuhan Dasar, (2017:Maret,10)
.https://dewasastra.wordpress.com/2012/03//10/Pendidikan-sebagai-kebutuhan-dasar/, diakses 7 November 2017.

Penerima KIP Palembang mencapai 103.693,
<http://korankito.com/2016/10/10/07/Penerima-Palembang-mencapai-103-693/>,
diakses 27 Februari 2017.

D. Jurnal

Putri Mutiara Rakista. (2020). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Jurnal Administrasi Negara, 2598-4039

Yudi Agusman, (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka (Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik). Jurnal Homepage : https://ejournal.wardewa.ac.id/index.php/public_inspiration

Endang Suparman. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Syntax Transformation, Vol.1. No 2 April 2020

Nurhasana Hayati dan Eka Yuliana Sar (2019), Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar Di SMA Negeri 1 Sembawa.

Romanti Agusman, Adia Ferizko. (2023). Implementasi Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru). Jurnal Ilmiah Publika P-ISSN 2337-4446 IE-ISSN 2684-8295

LAMPIRAN A
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
PERTANYAAN KEPADA UTAMA

PIHAK SEKOLAH SD NEGERI 106162 PERCUT SEI TUAN

No	Nama informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Hj.Nurlaili Pulungan, M.Pd	Bagaimana dampak PIP terhadap kehadiran dan motivasi belajar siswa penerima bantuan?	Program Indonesia Pintar (PIP) secara nyata memiliki dampak positif terhadap kehadiran dan motivasi belajar siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan finansial yang diberikan bukan hanya sekadar uang, melainkan juga sebuah "jembatan" yang membantu mereka tetap terhubung dengan pendidikan.
2.	Nur Fauziah Husna Nst, S.Pd.I	Pertanyaan dibaca dari lampiran yang sudah di sediakan "Bagaimana Anda memahami tujuan dan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP)	Guru tersebut Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin

PERTANYAAN KEPADA INFORMAN TAMBAHAN

SISWA YANG MENDAPATKAN KARTU INDONESIA PINTAR SD NEGERI 106162 PERCUT SEI TUAN

No	Nama informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Indah Rizkinah Selaku orang tua siswa	Apakah ada kendala terkait administrasi atau birokrasi dalam pelaksanaan PIP di sekolah?	orangtua tersebut ”Pasti, dalam setiap program pemerintah, termasuk PIP, sering kali ada kendala terkait administrasi dan birokrasi di tingkat sekolah. Kendala-kendala ini bisa menghambat penyaluran bantuan kepada siswa yang berhak

DATA INFORMAN PENELITIAN

1. Informan kunci

Nama : Hj.Nurlaili Pulungan, M.Pd

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 50 Tahun

Jabatan : Kepala Sekolah

Nama : Nur Fauziah Husna Nst, S.Pd.I

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 35 Tahun

Jabatan : Guru

2. Informan Tambahan

Nama : Indah Rizkinah

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 40 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



LAMPIRAN B DOKUMENENTASI



Gambar 1 Informan Utama
Ibu Hj.Nurlaili Pulungan M.Pd Selaku Kepala Sekolah Dasar 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang



Gambar 2. Wawancara Dengan Guru SDN 106162



Gambar 3 Sekolah Dasar 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang



Gambar 4 Dengan Orangtua Wali Murid Penerima PIP









PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

UPT SPF SDN NO. 106162 MEDAN ESTATE
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

NSS : 101070106070

NPSN : 10213398

Email : sdnmedanestate@gmail.com



Alamat : Jalan Pasar V Timur Medan Estate,

Kode Pos : 20371

SURAT KETERANGAN

No. 421.2/PD/0223/SD/ME/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HJ. NURLAILI PULUNGAN, M.Pd
Nip : 19730424 199611 2 002
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV C
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPT SPF SDN 106162 Medan Estate

Dengan ini menerangkan bahwa :

No.	Nama	NIM
1	AYU MAIDA SARI	198520019

Benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dengan Judul Penelitian
**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR(PIP) di SD
NEGERI 106162 MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Medan Estate, 21 Juli 2025
UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SD Negeri No. 106162 Medan Estate
Kecamatan Percut Sei Tuan

HJ. NURLAILI PULUNGAN, M.Pd

NIP : 19730424 199611 2 002





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223

Kampus II

Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122

Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2046.FIS.0 01.10/VII/2025
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Riset

Medan, 17 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SD Negeri 106162
Di Tempat

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ayu Maida Sari
NIM : 198520019
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada SD Negeri 106162 untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 106162 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n Dekan,
Wakil Rector Penjaminan Mutu Akademik



Riadi, S.E, M.I.Kom

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lampiran 1

Instrumen Wawancara Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)

A. Informasi Umum Responden

1. Nama (bisa anonim jika diperlukan)
2. Jabatan/Peran di sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Operator PIP, Orang Tua Siswa, dsb.)
3. Lama terlibat dalam pelaksanaan PIP

B. Pemahaman dan Sosialisasi PIP

1. Bagaimana Anda memahami tujuan dan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP)?
2. Bagaimana proses sosialisasi program PIP di sekolah ini? Apakah semua pihak terkait sudah mendapatkan informasi yang cukup?
3. Apakah ada kendala dalam penyampaian informasi atau sosialisasi PIP kepada peserta didik dan orang tua?

C. Proses Penyaluran dan Pelaksanaan PIP

1. Bagaimana mekanisme pendataan dan seleksi siswa penerima PIP di SD Negeri 106162 Medan Estate?
2. Apakah proses pengajuan dan pencairan dana PIP berjalan lancar? Jika ada kendala, mohon jelaskan.
3. Bagaimana peran operator PIP dan guru pembantu dalam pelaksanaan program ini?
4. Apakah ada kendala terkait administrasi atau birokrasi dalam pelaksanaan PIP di sekolah?

D. Dampak dan Evaluasi Pelaksanaan PIP

1. Bagaimana dampak PIP terhadap kehadiran dan motivasi belajar siswa penerima bantuan?
2. Apakah PIP membantu mengurangi angka putus sekolah di sekolah ini?
3. Bagaimana tanggapan orang tua siswa terhadap program PIP?

4. Apakah ada evaluasi rutin terhadap pelaksanaan PIP di sekolah? Jika ya, bagaimana hasilnya?

E. Kendala dan Solusi

1. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan PIP di sekolah ini?
2. Bagaimana sekolah mengatasi kendala-kendala tersebut?
3. Apa saran Anda agar pelaksanaan PIP di SD Negeri 106162 Medan Estate dapat lebih optimal?



Lampiran 2

Tabel ini mengorganisasi indikator dan pertanyaan wawancara secara sistematis agar memudahkan pencatatan dan analisis data.

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban / Catatan
1	Pemahaman Program PIP	Bagaimana pemahaman Anda tentang tujuan dan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP)?	
2	Sosialisasi PIP	Bagaimana proses sosialisasi PIP di sekolah ini? Apakah semua pihak terkait sudah mendapatkan informasi?	
3	Kendala Sosialisasi	Apakah ada kendala dalam penyampaian informasi PIP kepada siswa dan orang tua?	
4	Mekanisme Pendataan	Bagaimana mekanisme pendataan dan seleksi siswa penerima PIP di sekolah?	
5	Proses Pengajuan dan Pencairan	Bagaimana proses pengajuan dan pencairan dana PIP? Apakah ada kendala?	
6	Peran Operator dan Guru	Bagaimana peran operator dan guru dalam pelaksanaan PIP?	
7	Kendala Administrasi	Apakah terdapat kendala administrasi atau birokrasi dalam pelaksanaan PIP?	

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban / Catatan
8	Dampak terhadap Siswa	Bagaimana dampak PIP terhadap kehadiran dan motivasi belajar siswa penerima?	
9	Dampak terhadap Putus Sekolah	Apakah PIP membantu mengurangi angka putus sekolah?	
10	Tanggapan Orang Tua	Bagaimana tanggapan orang tua siswa terhadap program PIP?	
11	Evaluasi Pelaksanaan	Apakah ada evaluasi rutin terhadap pelaksanaan PIP di sekolah? Bagaimana hasilnya?	
12	Kendala Utama	Apa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan PIP di sekolah?	
13	Solusi dan Saran	Bagaimana solusi yang dilakukan dan saran agar pelaksanaan PIP lebih optimal?	

SK Nominasi PIP SD 2023

Sekolah: UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE

peserta_didik_id	sekolah_id	npsn	nomenklatur	kelas
D98F8411-F6BF-40A4-883B-08186E3B0887	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	2
1A5083B1-FF8A-44A9-AACE-0B0DF3E9BE39	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	2
08122A47-6717-4799-973E-4C652DC1136E	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	2
5703BFA1-1FD5-46D2-BC34-74DB054418FD	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	2
C7EF134B-DD89-4F25-8A0B-8230A9AF17DF	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	5
A0EC5017-A03C-4F76-BB78-8941F9C60271	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	5
F3F81002-F040-4999-AC00-A64E5E991BB5	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	2
A62C11D0-EC8A-4A21-AB44-A9460D65F711	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	6
B70C4A1B-D4D5-490C-AF51-A972E1A671DB	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	3
2CCFA45E-35D0-4060-B271-ACC3200BC177	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	2
B174ED6C-973E-4B15-82ED-B031FBFD9A4A	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	5
EAA2B996-228C-4E84-BC6E-C38C6D03E4CE	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	5
21FC846A-94C3-4AD5-B286-C394661738A7	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	2
C0EAE5E-6C12-41E0-9E47-E0BA9F577EDC	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	4
1682E96F-557F-4391-9FFB-FB820915C5B0	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	5
BC022034-24EB-45CD-AC07-FD3BD23B63F9	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	2
82FBC377-1928-4420-9244-FF21D266C2C3	2056B7D7-2EF5-E011-8B58-B74A2661A71F	10213398	UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE	2

nama_pd	nama_ibu_kandung	nama_ayah	tanggal_lahir	tempat_lahir
AISYAH FAIHA	RIKA YULIANITA		2016-11-14	BANDAR KHALIPAH
SASKIA TALITA SAKI	CHAIRUNNISYAH		2015-12-26	MEDAN
MASRURA PUTRI RAMADHAN WAR	LIS MAWARNI GEA		2016-06-22	LAUT DENDANG
AMANDA	INDAH RIZKINAH		2015-10-31	MEDAN
AFIQA RATNA JULIA TRYNA	NINGRUM SUNDARI	ABDI GANDA TRYNA	2013-07-01	Medan
JOSUA APRILEND SIMANJUNTAK	LENI NORA SRIWANI	DOLI RUDIANTO SIMANJUNTAK	2013-04-30	MEDAN
AZKIA SALSABILA PUTRI BATUBARA	RABITAH		2016-07-05	MEDAN
MUHAMMAD FARHAN	RINA ANDRIANI	ADI SUCIPTO	2012-03-14	Medan
KASIH AUDIA	NANA SARI		2014-12-25	Medan Estate
ADVENT JONATAN MANALU	RISKA SITUMORANG		2015-12-02	SIMPANG KANAN
CHARLY MARCELLO SIANTURI	MELVA NAINGGOLAN	HENGKI SIANTURI	2013-06-16	Laut Dendang
SYIFA ANNAILA	NABILA	ANDI PUTRA	2012-10-13	Medan
NAUFAL FIRMANSYAH	LISMIDA		2015-10-29	MEDAN
MHD.FIDEL AKBAR HASIBUAN	SITI ROSMAH	ALI AKBAR HASIBUAN	2012-05-26	Helvetia
RAFA ALFIANDI DAMANIK	EFRIDA SARI HARAHAP, S.HI	MULIADI DAMANIK	2013-07-04	Pematang raya
REZKIKA ERPIANJA	ERNA FATMAPURI		2015-01-10	MEDAN
JASON STEFANUS NABABAN	ROMA IDA ULI BR.PURBA		2015-11-17	LAUT DENDANG

nisl	nik	jenis_kelamin	nominal	no_rekening	tahap_id	nomor_sk
3167325672	1207265411160010	P	450000	'208301032161501	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3151305706	1207266612150000	P	450000	'208301032146501	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3169446619	1207266206160010	P	450000	'208301032156506	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3162338532	1271207110150000	P	450000	'208301032141501	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3135488328	1207264107130000	P	450000	'208301032180505	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
0137720920	1207213004130000	L	450000	'208301032175500	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3167179232	1207264507160010	P	450000	'208301032163503	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
0121095381	1271141403120000	L	450000	'208301028147507	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3145702783	1207266512140010	P	450000	'208301032176506	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3162052012	1407110202150000	L	450000	'208301032177502	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3136922884	1207261606130000	L	450000	'208301032139504	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3123853765	1271145310120000	P	450000	'208301032158508	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3159025577	1271042910150000	L	450000	'208301032171506	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3122233674	1271142605120000	L	450000	'208301023798507	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3131239632	1207260407130010	L	450000	'208301028156506	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3151035684	1207265001150010	P	450000	'208301032191506	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023
3159358097	1207261711150010	L	450000	'208301032185505	76	235/PLPP.1.1/BP/SK.NOM76/2023

tanggal_sk	nama_rekening	tanggal_aktivasi	no_KIP	no_KKS	no_KPS	virtual_acc	semester_id	layak_pip
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398020002AA	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398020009SI	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398020006MR	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398020003AA	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398050012AA	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398050014JK	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398020004AA	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398060017MN	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398030010KA	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398020001AU	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398050013CI	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398050016SA	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398020007NH	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398040011MN	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398050015RK	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398020008RA	20231	Ya
2023-11-01	Belum Aktivasi					ND107610213398020005JN	20231	Ya

semester_id	layak_pip	keterangan_pencairan	tahap_keterangan	nama_pengusul
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang
20231	Ya	Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2023	Nominasi kelas berjalan usulan dinas fase 2 - Reguler	Kab. Deli Serdang